PELAKSANAAN PELAYANAN SOSIAL TERHADAP ANAK BALITA TERLANTAR DI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN BALITA KABUPATEN SIDOARJO

Suci Dwi Purwanti

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Email: sucidwipurwanti@gmail.com

Fitrotun Niswah, S.AP., M.AP.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Email: vita.unesa@yahoo.com

Abstrak

Sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi anak balita terlantar, pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya dalam menanganinya melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kabupaten Sidoarjo yang difungsikan sebagai wadah untuk menampung dan mengasuh anak-anak balita terlantar tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian secara lebih mendalam yang bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan sosial terhadap anak balita terlantar di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kabupaten Sidoarjo beserta hambatan yang dialami. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahap pelaksanaan pelayanan sosial meliputi bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan beserta hambatan yang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan sosial terhadap anak balita terlantar di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan dasar anak balita terlantar yang ditampung. Hal ini dapat dilihat pada tahap pelaksanaan pelayanan sosial yang meliputi kegiatan bimbingan fisik mampu memulihkan kembali kondisi kesehatan anak balita, bimbingan mental mampu menanamkan nilai-nilai keagamaan dan moral pada anak balita, bimbingan sosial mampu mengembangkan interaksi sosial anak balita, serta bimbingan keterampilan mampu melatih kemampuan anak balita dalam belajar membaca, menulis, berhitung, menggambar, dan lain sebagainya. Sedangkan hambatan yang dialami adalah adanya kesulitan dalam mengawasi anak balita autisme dan masih kurangnya tenaga pengasuh yang bertugas untuk mendampingi anak-anak. Dengan demikian, disarankan agar pihak UPT memberikan pendidikan atau pelatihan kepada para pengasuh berupa pengenalan terkait dengan autisme dan cara menyikapinya sehingga pengawasan terhadap anak autisme dapat dilakukan dengan lebih mudah serta menambah jumlah pengasuh yang ada.

Kata Kunci : Pelayanan, Sosial, Anak

Abstract

As one of the areas with abandoned toddler potential, East Java Provincial Government attempts to handle the toddler through Technical Unit Department of Protection and Social Service Care Toddler of Sidoarjo as a place to accommodate and to take care of the neglected toddler. Therefore, in-depth research is needed to describe the implementation of social service for neglected toddler in Technical Unit Department of Protection and Social Service Care Toddler of Sidoarjo and the obstacles that occur. The type of research used for this study is descriptive research with qualitative approach. The focus of research used is the implementation of social service which includes physical guidance, mental guidance, social guidance, and skills guidance along with the obstacles that occur. Data collection technique is done through observation, interview, and documentation. While the data analysis technique used is data collection, data reduction, data presentation, and verification. The results of this research show that the implementation of social service to neglected toddler in Technical Unit Department of Protection and Social Service Care Toddler of Sidoarjo has run well and able to meet the basic needs of neglected toddler who accommodated. This can be seen in the implementation of social services which includes physical guidance activities that able to restore the state of toddler's health, mental guidance is able to instill religious and moral values in toddler, social guidance is able to develop toddler's

social interaction, and skill guidance is able to train the ability of toddler in learning how to read, write, count, draw, and so forth. The obstacles that occur are the difficulty in supervising autism toddler and still lack of caregiver who served to accompany the toddler. Thus, it is suggested to provide a lesson or training sessions for the caregivers to know more about autism so they can handle the autism toddler easily and also to add the number of caregivers.

Keywords: Social, Service, Toddler

PENDAHULUAN

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu kegiatan yang terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk melindungi seluruh rakyat dari kondisi hidup yang tak layak. Hal ini bahkan ditegaskan melalui Pancasila butir kelima yang berbunyi, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” di mana sila tersebut dapat dimaknai bahwa pemerintah pusat maupun daerah sebagai penyelenggara negara berkewajiban untuk memberikan keadilan secara merata bagi setiap warga negara dalam memperoleh hak-hak dasar untuk hidup sehingga kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial diprioritaskan untuk menangani para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yakni suatu individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang memiliki kondisi kehidupan tidak layak secara kemanusiaan dengan kriteria seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Salah satu dari sekian persoalan PMKS yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah adalah anak terlantar.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”. Masih di dalam peraturan yang sama, pemerintah telah berkomitmen untuk melindungi anak terlantar dengan memberikan dukungan berupa sarana, prasarana, dan sumber daya manusia dalam rangka upaya penyelenggaraan perlindungan anak.

Sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia, Pulau Jawa tidak terlepas dengan munculnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang salah satunya adalah anak balita terlantar. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa pada tahun 2015 Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat merupakan tiga wilayah dengan

jumlah anak balita terlantar tertinggi di Pulau Jawa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Anak Balita Terlantar Tertinggi di Pulau Jawa
Menurut Provinsi Tahun 2015

No.	Provinsi	Jumlah Anak Balita Terlantar
1.	Jawa Tengah	27.522 jiwa
2.	Jawa Timur	18.201 jiwa
3.	Jawa Barat	6.587 jiwa
4.	Yogyakarta	1.978 jiwa
5.	Banten	1.409 jiwa
6.	D.K.I Jakarta	200 jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Berbagai Provinsi

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari keenam provinsi yang berada di Pulau Jawa, jumlah balita terlantar tertinggi pada tahun 2015 berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan angka mencapai 27.522 jiwa. Namun jika melihat dari jumlah lembaga milik pemerintah yang tersedia untuk menampung anak balita terlantar, maka Provinsi Jawa Timur masih mengalami kekurangan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Sebagai wilayah dengan jumlah anak balita terlantar tertinggi kedua yakni 18.201 jiwa, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Sosial hanya memiliki satu lembaga untuk menampung anak balita terlantar yakni Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo (sumber: Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2008). Sedangkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah setidaknya telah memiliki tiga lembaga untuk menampung anak balita terlantar yakni Balai Rehabilitasi Sosial Woro Wiloso Salatiga yang kemudian membawahi dua unit rehabilitasi yakni Unit Rehabilitasi Sosial Taman Harapan Salatiga dan Unit Rehabilitasi Sosial Wiloso Tomo Salatiga (Musfiroh dan Ilyas, 2016:57). Dengan minimnya lembaga yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menampung anak balita terlantar, maka hanya sebagian kecil saja yang dapat ditangani oleh pemerintah sehingga

tantangan dalam penanganan anak balita terlantar pun akan semakin besar.

UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kabupaten Sidoarjo memiliki wewenang untuk melaksanakan sebagian tugas dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam memberikan pelayanan sosial berupa penampungan, pengasuhan, serta berfungsi sebagai tempat transit proses adopsi anak balita terlantar di mana hal ini telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sehingga tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai dari pelayanan sosial yang diberikan kepada para anak balita terlantar ini adalah terwujudnya kesejahteraan anak agar dapat terlindungi hak-haknya sehingga mampu untuk bertumbuhkembang dan melangsungkan hidupnya dengan baik.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam guna mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kabupaten Sidoarjo dalam menangani anak balita terlantar. Oleh karena itu, judul penelitian yang diambil adalah “Pelaksanaan Pelayanan Sosial Terhadap Anak Balita Terlantar di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kabupaten Sidoarjo”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian terletak di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jl. W. Monginsidi No. 25 Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahap pelaksanaan pelayanan sosial berdasarkan pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2004 tentang Standarisasi Panti Sosial (dalam Situmorang, 2013:69-70) yang disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kabupaten Sidoarjo meliputi bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan beserta hambatan yang terjadi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan subyek penelitian sebagai berikut:

- a. Ibu Lilik, selaku Staf Seksi Pelayanan Sosial di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kabupaten Sidoarjo.

- b. Ibu Choldjaroh, selaku Staf Seksi Pengembangan dan Pembinaan Lanjut di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kabupaten Sidoarjo.
- c. Ibu Utami, selaku Pengasuh di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kabupaten Sidoarjo.
- d. Ibu Anik, selaku Pengasuh di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kabupaten Sidoarjo.
- e. Ibu Deni, selaku Perawat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kabupaten Sidoarjo.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita berlokasi di Jalan W. Monginsidi No. 25 Kabupaten Sidoarjo. UPT ini didirikan pada tahun 2009 dan merupakan satu-satunya Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah naungan Dinas Sosial yang secara khusus difungsikan sebagai wadah untuk menampung, mengasuh, dan merawat anak-anak balita terlantar berusia 0-5 tahun sekaligus berfungsi sebagai tempat transit proses adopsi anak kepada calon orang tua asuh.

UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kabupaten Sidoarjo memiliki visi “Melindungi dan menyelamatkan anak dari ketelantaran”. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang dijunjung ialah:

- a. Memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial secara layak; serta
- b. Membangun kepercayaan diri anak, disiplin, dan bertanggungjawab.

Pelaksanaan Pelayanan Sosial Terhadap Anak Balita Terlantar di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kabupaten Sidoarjo
Pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kabupaten Sidoarjo dalam memenuhi beragam kebutuhan dasar anak balita terlantar yang ditampung meliputi empat jenis bimbingan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, yakni:

1. Bimbingan Fisik

Kegiatan bimbingan fisik dilaksanakan dengan mengadakan berbagai kegiatan untuk melatih fisik anak seperti senam pada hari libur. Selain itu, anak-anak juga diajak untuk bermain di taman bermain ataupun bersepeda di waktu luang. Sedangkan bagi anak bayi yang belum genap berusia 1 tahun, pada pagi hari pihak UPT akan menjemur mereka di bawah sinar matahari sehingga mereka akan mendapatkan asupan vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh. Bagi anak yang telah menginjak usia sekitar 1 tahun ke atas, pelatihan jalan juga dilakukan sehingga anak tersebut mampu untuk berjalan dengan lancar. Adapun untuk menunjang perkembangan fisik anak yang mengalami keterlambatan pertumbuhan, pihak UPT juga memberikan terapi seperti terapi bicara dan terapi fisik lainnya sehingga kondisinya dapat menjadi lebih baik.

Untuk menunjang agar anak-anak balita dapat mengikuti berbagai kegiatan fisik tersebut, pihak UPT memberikan asupan makanan sebanyak 3 kali dalam sehari yaitu makan pagi, makan siang, dan makan sore. Makanan yang diberikan pun diolah secara langsung oleh pihak UPT sehingga kualitas makanan dapat lebih terjamin. Dalam menentukan menu makanan, pihak UPT bekerja sama dengan ahli gizi dari Puskesmas setempat sehingga kebutuhan asupan nutrisi yang diterima oleh anak-anak balita yang ditampung dapat terpenuhi sesuai dengan tumbuh kembang anak. Selain itu, pihak UPT juga secara rutin memberikan imunisasi lengkap kepada setiap anak agar mereka terhindar dari berbagai macam penyakit.

2. Bimbingan Mental

Kegiatan bimbingan mental dilakukan dengan cara mengajarkan pelajaran mengaji dan doa-doa pendek pada sore hari selama 2-3 kali dalam seminggu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai agama kepada anak sejak dini. Adapun pihak UPT juga memberikan pendidikan moral lainnya untuk mengembangkan mental anak seperti berlaku sopan santun, menjabat tangan, mengucapkan salam, berterima kasih, dan sikap saling peduli antar satu sama lain.

Selain itu untuk menanamkan sikap mandiri kepada anak, pihak UPT juga memberikan pelatihan cara makan yang baik dan cara membersihkan diri (*toilet training*) meliputi mandi dan buang air.

Diharapkan dengan adanya pelatihan cara makan dan cara membersihkan diri ini, anak-anak tersebut mulai terbiasa dan nantinya akan mampu untuk melakukannya secara mandiri di kemudian hari.

3. Bimbingan Sosial

Bimbingan sosial yang diberikan oleh UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kabupaten Sidoarjo adalah dengan mengajak anak-anak untuk bermain dan belajar bersama. Melalui kegiatan tersebut, jalinan interaksi antara satu anak dengan anak lainnya akan tumbuh seiring dengan waktu yang dihabiskan bersama-sama. Dengan demikian, diharapkan nantinya anak-anak tersebut mampu untuk menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan lingkungan sosialnya di masa mendatang.

Adapun untuk mengembangkan interaksi sosial dengan orang lain yang bukan berasal dari lingkungan UPT, anak-anak diajak berekreasi mengunjungi taman safari maupun ke gedung aula untuk menghadiri acara. Hal ini bertujuan untuk melatih anak-anak tersebut untuk mulai berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

4. Bimbingan Keterampilan

Bimbingan keterampilan dilakukan dengan memberikan akses pendidikan formal bagi anak-anak balita yang ditampung dengan mengikuti kegiatan belajar di PAUD Cempaka, TK Dharma Wanita, dan SLB Mutiara Hati bagi anak yang berkebutuhan khusus. Di lembaga pendidikan inilah nantinya anak-anak tersebut akan mengembangkan kemampuannya dalam membaca, menulis, menggambar, berhitung, dan lain sebagainya.

Selain itu, pihak UPT juga menambahkan kegiatan bimbingan keterampilan di luar jam sekolah dengan memberikan beragam macam kegiatan untuk mengasah kemampuan anak seperti melukis, membaca, bernyanyi, bercerita, dan lain-lain.

Hambatan dalam Pelaksanaan Pelayanan Sosial Terhadap Anak Balita Terlantar di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kabupaten Sidoarjo

Selama dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan pelayanan sosial, tidak dapat dihindari bahwa para pelaksana akan menemui berbagai hambatan yang terjadi. Demikian pula dengan pelaksanaan Pelayanan Sosial Terhadap Anak Balita

Terlantar di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya terkait dengan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan sosial terhadap anak balita terlantar, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan yang terjadi. Hambatan tersebut antara lain:

- a. Pihak UPT masih mengalami kendala untuk mengawasi anak balita autisme dikarenakan sifat anak balita autisme yang tidak mudah untuk ditebak sehingga selalu memerlukan pengawasan yang lebih ekstra. Pengawasan ekstra ini perlu dilakukan mengingat tingkah laku anak balita autisme yang spontan dan tidak terduga ini bisa saja membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain.
- b. Tenaga pendamping yang ada saat ini dirasa masih kurang untuk menjaga seluruh anak yang ditampung. Tenaga pendamping yang tersedia saat ini adalah sebanyak 16 orang pengasuh dan 4 orang perawat yang diperuntukkan mendampingi 50 anak. Idealnya untuk satu orang pengasuh setidaknya menjaga 3-5 anak, namun dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia maka dalam satu kali tugas piket yang diisi oleh 7-8 orang, satu orang pengasuh setidaknya harus menjaga 7 anak sekaligus. Dengan adanya hambatan tersebut, maka untuk saat ini pihak UPT hanya memaksimalkan tenaga pendamping yang sudah ada.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada data penelitian yang telah diperoleh, dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan Pelayanan Sosial Terhadap Anak Balita Terlantar di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kabupaten Sidoarjo telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yakni menampung dan merawat anak balita terlantar di lingkup wilayah Provinsi Jawa Timur sehingga hak-hak anak untuk dapat bertumbuhkembang dapat lebih terjamin. Adapun bentuk pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan fisik yang diberikan kepada anak balita yang ditampung sudah dapat memenuhi kebutuhan fisik yang dibutuhkan untuk perkembangan motorik

anak. Kegiatan bimbingan fisik meliputi senam, bersepeda, bermain, pelatihan jalan, terapi, dan penjemuran bayi di bawah sinar matahari pada pagi hari. Selain itu, pihak UPT juga memberikan asupan makanan 3 kali dalam sehari dan senantiasa menjaga kualitas makanan dan gizi anak secara menyeluruh serta memberikan imunisasi rutin sehingga kondisi kesehatan anak-anak tersebut dapat meningkat dan mampu menjalani aktivitas sehari-harinya dengan baik.

2. Bimbingan mental berguna untuk menanamkan nilai-nilai moral seperti keagamaan, sopan santun, sikap saling peduli, dan kemandirian. Untuk itu pihak UPT memberikan berbagai pendidikan moral seperti mengaji selama 2-3 kali dalam seminggu, mengajarkan anak untuk berperilaku sopan, dan melatih anak untuk mengetahui cara makan dan mandi dengan benar sehingga sikap mandiri akan perlahan tumbuh.
3. Bimbingan sosial dilakukan untuk membantu anak-anak balita mengembangkan kemampuan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan tersebut, pihak UPT mengajak anak-anak untuk bermain dan belajar bersama. Selain itu, pada waktu tertentu mereka juga diajak untuk berekreasi ke taman safari untuk menghabiskan waktu bersama dengan anak-anak yang berasal dari panti lain maupun menghadiri acara-acara yang diselenggarakan di gedung aula sehingga mereka akan terbiasa untuk bertemu dengan banyak orang.
4. Bimbingan keterampilan dilaksanakan dengan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dengan mengikutsertakan mereka untuk bersekolah di PAUD Cempaka, TK Dharma Wanita, dan SLB Mutiara Hati bagi anak berkebutuhan khusus. Tujuan dari diikutsertakannya anak-anak ke dalam lembaga pendidikan ini adalah untuk melatih dan mengembangkan keterampilan dan potensi yang dimiliki oleh anak sejak dini seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, dan lain-lain. Selain di pendidikan formal, pihak UPT juga memberikan bimbingan keterampilan di luar jam sekolah seperti melukis, membaca, bernyanyi, bercerita, dan sebagainya.

Adapun hambatan yang terjadi selama proses Pelaksanaan Pelayanan Sosial Terhadap Anak Balita Terlantar di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kabupaten Sidoarjo antara

lain seperti pengawasan terhadap anak balita autisme yang memerlukan perhatian lebih ekstra mengingat sifat anak balita autisme ini cenderung spontan dan sulit untuk ditebak. Selain itu, tenaga pengasuh yang bertugas untuk mendampingi dan mengawasi anak-anak yang ditampung dirasa masih kurang mencukupi sehingga pengawasan yang diberikan pun memerlukan kerjasama dari seluruh pengasuh maupun perawat yang saat itu sedang bertugas.

Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti memiliki beberapa saran yang sekiranya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan Pelaksanaan Pelayanan Sosial Terhadap Anak Balita Terlantar di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kabupaten Sidoarjo menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang, yaitu:

1. Untuk pengawasan terhadap anak balita autisme, ada baiknya apabila para tenaga pengasuh diberikan pendidikan atau pelatihan berupa pengenalan terkait dengan autisme dan cara menyikapinya sehingga penanganan terhadap anak balita autisme dapat dilakukan dengan lebih mudah.
2. Menambah jumlah tenaga pengasuh hingga mencapai jumlah ideal sehingga perhatian dan pengawasan yang diberikan kepada seluruh anak-anak balita yang ditampung dapat dilakukan dengan lebih baik dan menyeluruh.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Fitrotun Niswah, S.AP., M.AP. Serta mengucapkan terima kasih kepada Dosen Penguji Dra. Meirinawati, M.AP dan Trena Aktiva Oktariyanda, S.AP., M.AP.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. “*Banten Dalam Angka 2016*”, (online), (<http://banten.bps.go.id/index.php/publikasi/311>), diakses pada tanggal 27 November 2016).

Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. “*Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2016*”, (online), (<https://yogyakarta.bps.go.id/index.php/publikasi/134>), diakses pada tanggal 27 November 2016).

Badan Pusat Statistik Provinsi Jakarta. “*Jakarta Dalam Angka 2016*”, (online), (<https://jakarta.bps.go.id/index.php/publikasi/132>), diakses pada tanggal 27 November 2016).

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. “*Jawa Barat Dalam Angka 2016*”, (online), (<https://jabar.bps.go.id/index.php/publikasi/76>), diakses pada tanggal 27 November 2016).

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. “*Data dan Informasi Lingkungan Hidup Jawa Tengah 2015*”, (online), (<https://jateng.bps.go.id/index.php/publikasi/398>), diakses pada tanggal 8 Juni 2017).

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. “*Jawa Timur Dalam Angka 2016*”, (online), (<http://jatim.bps.go.id/index.php/publikasi/160>), diakses pada tanggal 27 November 2016).

Musfiroh, Tursina Intan dan Ilyas. 2016. “Implementasi Program Balai Pelayanan Sosial pada Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Salatiga”. *Jurnal Pendidikan Nonformal dan Pemberdayaan Masyarakat*, (online), Jilid 5, No. 1, (<https://journal.unnes.ac.id>), diunduh pada tanggal 3 Februari 2017).

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Situmorang, Chazali H. 2013. *Mutu Pekerja Sosial di Era Otonomi Daerah*. Depok: Cinta Indonesia.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kabupaten Sidoarjo.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.